

Pengelolaan hutan lindung lestari





© BSN 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Prinsip dan kriteria pengelolaan hutan lindung lestari	3
4 Kriteria dan indikator pengelolaan hutan lindung lestari.....	3



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7896:2013, Pengelolaan hutan lindung lestari digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengelolaan hutan lindung secara lestari.

Standar ini disusun dan telah dibahas pada rapat teknis yang dihadiri oleh anggota PT 65-01 Pengelolaan Hutan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012 dan serta disepakati dalam rapat konsensus di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012. Hadir pada rapat tersebut keterwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan regulator.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 dan langsung disetujui menjadi Rancangan Akhir SNI (RASNI) untuk ditetapkan menjadi SNI.



Pengelolaan hutan lindung lestari

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lindung lestari sebagai panduan pengelolaan hutan lindung lestari untuk digunakan pemangku kepentingan.

2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

2.1

hutan lindung

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah

2.2

manajemen kawasan

strategi pengelolaan kawasan hutan yang bertujuan agar kawasan aman jangka panjang, terdiri atas kegiatan pengukuhan, penataan dan pengamanan kawasan

2.2.1

pengukuhan kawasan hutan

serangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas (pengukuran, pemetaan), penetapan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetap

2.2.2

penataan

bagian dari kegiatan manajemen kawasan yang bertujuan untuk mengatur kawasan hutan menjadi unit-unit manajemen terkecil dalam pengelolaan hutan lindung

2.2.3

pengamanan

bagian kegiatan manajemen hutan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan dan gangguan-gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya hutan lindung

2.3

tindakan manajemen

strategi pengelolaan hutan lindung lestari yang bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan fungsi-fungsi ekologi/lingkungan dan sosial ekonomi yang terdiri atas kelola lingkungan dan kelola sosial

2.3.1

kelola ekologi

bagian dari kegiatan manajemen untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif kegiatan pengelolaan hutan lindung

2.3.2

kelola sosial ekonomi

bagian dari kegiatan manajemen utama yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi kehidupan komunitas setempat

2.4

penataan organisasi

kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang menjamin dimensi manajemen (kawasan dan utama) dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lindung lestari

2.5

penyiapan sumber daya manusia

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja di unit pengelola untuk melaksanakan dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung

2.6

kelestarian fungsi ekologis dan tata air

terpeliharanya fungsi ekologi hutan lindung dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah

2.7

kelestarian fungsi sosial dan ekonomi

terpeliharanya fungsi ekonomi dan sosial hutan lindung bagi masyarakat secara luas

2.8

standar pengelolaan hutan lindung

seperangkat indikator pengelolaan hutan lindung yang merupakan input, proses maupun output dari tindakan-tindakan manajemen yang ditujukan untuk pemeliharaan sumber daya hutan lindung, fungsi tata air, fungsi lingkungan lainnya, akses masyarakat, manfaat ekonomi bagi masyarakat serta integrasi sosial budaya masyarakat.

2.8.1

prinsip

aturan mendasar yang memiliki karakter dari suatu tujuan atau pandangan mengenai fungsi ekosistem hutan atau mengenai aspek-aspek yang relevan dari sistem sosial yang berinteraksi dengan ekosistem hutan

2.8.2

kriteria

kondisi atau aspek-aspek dari proses dinamis ekosistem hutan atau kondisi sistem sosial terkait yang menunjukkan implikasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan

2.8.3

indikator

parameter kualitatif atau kuantitatif yang dapat dinilai dalam hubungannya dengan pencapaian kriteria

2.9

proses partisipatif

proses turut berperan sertanya para pihak dalam suatu kegiatan secara efektif untuk mencapai tujuan

3 Prinsip dan kriteria pengelolaan hutan lindung lestari

3.1 Kelestarian fungsi ekologis dan tata air

- a) Terpeliharanya sumber daya hutan lindung
- b) Terpeliharanya fungsi tata air
- c) Terpeliharanya fungsi lingkungan lainnya

3.2 Kelestarian fungsi sosial dan ekonomi

- a) Terpeliharanya akses pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat yang adil
- b) Terpeliharanya sumber-sumber ekonomi masyarakat
- c) Terpeliharanya integrasi sosial budaya masyarakat

3.3 Prasyarat pengelolaan hutan lindung lestari

- a) Penataan organisasi
- b) Penyiapan sumber daya manusia
- c) Dukungan pendanaan

4 Kriteria dan indikator pengelolaan hutan lindung lestari

4.1 Terpeliharanya sumber daya hutan lindung

- a) Telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
- b) Terdapat hasil inventarisasi sumberdaya hutan lindung lengkap meliputi kondisi fisik, biologi, dan sosial
- c) Pembagian blok untuk setiap fungsi dipetakan secara jelas serta ditandai dengan jelas di lapangan
- d) Terdapat prosedur pengamanan kawasan hutan lindung yang menekankan pada pelibatan masyarakat.
- e) Terdapat sarana prasarana pengamanan
- f) Capaian penyelesaian masalah gangguan terhadap hutan lindung
- g) Terdapat prosedur identifikasi dan penanganan dampak-dampak negatif kegiatan pemanfaatan
- h) Laporan implementasi prosedur identifikasi dan penanganan dampak-dampak negatif kegiatan pemanfaatan, dan hasil-hasilnya

4.2 Terpeliharanya fungsi tata air

- a) Pembagian blok kawasan hutan lindung untuk pemeliharaan fungsi tata air memperhatikan karakteristik fisik, tutupan lahan dan struktur vegetasinya.
- b) Tingkat gangguan terhadap kawasan yang dapat menurunkan fungsinya sebagai pengatur tata air dapat dikendalikan
- c) Terdapat prosedur pengelolaan fungsi tata air dan diimplementasikan
- d) Fungsi tata air berjalan baik dan/atau mengalami peningkatan

4.3 Terpeliharanya fungsi lingkungan lainnya

- a) Pembagian blok kawasan hutan lindung untuk pemeliharaan fungsi lingkungan lainnya memperhatikan karakteristik keanekaragaman hayati dan potensi jasa lingkungan lain dari kawasan hutan lindung
- b) Tingkat gangguan terhadap jenis-jenis flora dan fauna penting (endemik/langka/dilindungi) dapat dikendalikan
- c) Terdapat prosedur yang diimpelentasikan terhadap pengelolaan flora dan fauna penting (endemik/langka/dilindungi) dan habitatnya
- d) Terdapat prosedur yang diimplementasikan terhadap pengelolaan jasa lingkungan lainnya
- e) Habitat flora dan fauna penting (endemik/langka/dilindungi) dan jasa lingkungan lainnya tidak mengalami penurunan fungsi

4.4 Terpeliharanya akses pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat yang adil

- a) Proses pengukuhan kawasan dilakukan secara partisipatif dan menghargai hak-hak masyarakat di dalam dan/atau di sekitarnya
- b) Pembagian blok fungsi kawasan hutan lindung dilakukan secara partisipatif dan menghargai hak-hak masyarakat di dalam dan/atau di sekitarnya
- c) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya pengamanan kawasan dan sumber daya hutan lindung baik
- d) Terdapat mekanisme pemberian akses pemanfaatan yang adil bagi masyarakat

4.5 Terpeliharanya sumber-sumber ekonomi masyarakat

- a) Pembagian blok kawasan hutan lindung untuk kepentingan sumber-sumber ekonomi masyarakat memperhatikan jenis dan tingkat pemanfaatan saat ini yang diperbolehkan dan potensi sumberdaya untuk pemanfaatan ke depan
- b) Tingkat pemanfaatan sumber daya ditentukan atas hasil analisis potensi yang ada dan tidak melebihi daya dukungnya
- c) Terdapat mekanisme pengaturan dan pemanfaatan terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat
- d) Terdapat upaya-upaya rehabilitasi atas sumberdaya yang dimanfaatkan masyarakat

4.6 Terpeliharanya integrasi sosial budaya masyarakat

- a) Pembagian blok kawasan hutan lindung untuk kepentingan sosial budaya masyarakat memperhatikan jenis pemanfaatan untuk kepentingan sosial budaya yang ada
- b) Terdapat mekanisme penyelesaian konflik atas kawasan dan sumberdaya yang adil dan efektif yang dirumuskan secara partisipatif
- c) Teknik produksi menggunakan cara-cara ramah lingkungan dan/atau sesuai kearifan tradisional setempat

4.7 Penataan organisasi

- a) Struktur organisasi pengelola yang partisipatif mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemeliharaan: sumber daya hutan lindung, fungsi tata air, fungsi lingkungan lainnya, akses masyarakat, manfaat ekonomi, integrasi sosial budaya masyarakat serta fungsi monitoring dan evaluasi
- b) Terdapat organisasi masyarakat pemanfaat sumber daya hutan lindung

- c) Mekanisme monitoring dan evaluasi berjalan efektif yang ditunjukkan oleh tindakan tepat atas umpan balik hasil kegiatan monitoring dan evaluasi

4.8 Penyiapan sumber daya manusia

- a) Tersedia sumber daya manusia yang memadai untuk menangani fungsi-fungsi pemeliharaan sumber daya hutan lindung, fungsi tata air, fungsi lingkungan lainnya, akses masyarakat, manfaat ekonomi, integrasi sosial budaya masyarakat, penanganan pengamanan kawasan serta fungsi monitoring dan evaluasi
- b) Terdapat upaya-upaya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat pemanfaat sumber daya hutan lindung untuk mendukung tujuan kelestarian manfaat hutan lindung

4.9 Dukungan pendanaan

- a) Tersedia sumber pendanaan yang cukup dan berkelanjutan untuk kepentingan pengelolaan fungsi-fungsi sumber daya hutan lindung, fungsi tata air, fungsi lingkungan lainnya, akses masyarakat, manfaat ekonomi, integrasi sosial-budaya masyarakat serta fungsi monitoring dan evaluasi.
- b) Pemanfaatan dana dilakukan dengan efektif.

